

Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif dalam Teori Kependudukan Marxis

Dede Mulyanto^{*)}

Abstract

As a concept, 'proletarization' is related to marxist's demographic theory and rarely used outside the marxist tradition. This article attempt to reintroduce the theory of proletarization through some empirical examples from Java and its coherency with other concepts in marxist tradition that is related to analyses of social change in the context of penetration of capitalist mode of production. In marxist's demographic theory, proletarization just a part of primitive accumulation. Primitive accumulation itself is a process in which main social change in capitalist mode of production penetration is done. In its main feature, the cretion of modern workers runs alongwith land commodification.

Key Words: marxist, social change, capitalist moe of production, proletarian

Abstrak

Istilah 'proletarisasi' lekat kaitannya dengan teori kependudukan marxis. Sebagai konsep keilmuan, proletarisasi tampaknya tidak punya tempat di dalam teori-teori kependudukan di luar tradisi marxis. Tulisan ini mencoba memperkenalkan kembali teori proletarisasi dengan mengajukan beberapa contoh empiris dari sejarah Jawa serta koherensinya dengan konsep-konsep lain dalam tradisi marxis yang terkait dengan proses perubahan sosial yang diakibatkan oleh penetrasi corak produksi kapitalis. Dalam teori kependudukan marxis, proletarisasi merupakan bagian dari proses akumulasi primitif. Akumulasi primitif itu sendiri menunjukkan bahwa perubahan sosial yaitu penetrasi corak produksi kapitalis sedang berlangsung. Penciptaan kelas pekerja modern merupakan prasyarat utama di samping komodifikasi tanah.

Kata Kunci: marxis, perubahan sosial, corak produksi kapitalis, proletar

^{*)} Staf Pengajar Jurusan Antropologi FISIP-UNPAD

Ciri Kapitalisme

Antropolog Marvin Harris (1999: 164) berpendapat bahwa salah satu ciri mendasar kapitalisme ialah komodifikasi hampir semua barang dan jasa, termasuk tanah dan tenaga kerja. Komodifikasi adalah proses menjadikan sesuatu yang sebetulnya bukan komoditi menjadi komoditi atau sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Kapitalisme beserta ciri komodifikatifnya ini bukanlah sistem perekonomian yang sejak azali mengada. Jantung yang membuatnya tetap hidup sebagai sebuah sistem perekonomian adalah hubungan produksi khas yang disebut kerja-upahan. Sebagai pranata terpokok kapitalisme, kerja-upahan mensyaratkan sejumlah besar golongan sosial tanpa sarana produksi sehingga satu-satunya jalan bagi mereka mendapatkan sandang, pangan, papan ialah dengan menjual tenaga kerja mereka sendiri.

Max Weber, sosiolog Jerman, meski banyak dinilai memiliki pandangan berbeda tentang kapitalisme dari pandangannya Karl Marx, pernah menyatakan juga bahwa salah satu ciri pokok yang membedakan perekonomian tradisional dengan kapitalisme modern ialah pengorganisasian rasional atas pekerja upahan bebas (Weber, 2001: 22-23). Tanpa golongan orang yang mengandalkan hidupnya dari menjual tenaga kerja, suatu perekonomian belum bisa dikatakan kapitalisme meski di dalamnya produksi komoditi, pasar, dan dorongan pencarian keuntungan menjadi unsur utamanya. Weber juga menegaskan bukan sekadar adanya orang-orang yang hidup dari menjual tenaga kerjanya, tetapi juga

“yang bisa dipekerjakan secara murah di pasar tenaga kerja merupakan sesuatu yang perlu untuk perkembangan kapitalisme” (Weber, 2001: 24-25).

Proletarisasi atau proses terciptanya golongan sosial yang hidup dari menjual tenaga kerjanya tidak terjadi begitu saja. Bukan pula karena Tuhan telah mentakdirkan segolongan orang menjadi pekerja sementara segolongan orang lainnya bisa hidup hanya sebagai pemilik sarana produksi. Perlu perubahan revolusioner di dalam kehidupan sosial untuk terciptanya golongan-golongan sosial ini. Perubahan ini tidak hanya dalam arti harus besarnya proporsi mereka yang hidup dari menjual tenaga kerjanya, tetapi juga dalam arti perubahan ini berujung pada pewajaran atas apa yang telah diciptakannya, baik oleh mereka yang dihisap tenaga kerjanya maupun oleh mereka yang berkedudukan sebagai penghisap.

Di dalam prasejarah kapitalisme, golongan sosial yang hidup dari menjual tenaga kerjanya pertamanya diciptakan dari golongan produsen langsung, yaitu mereka yang memenuhi kebutuhan hidup dari hasil mencurahkan tenaga kerja mereka sendiri seperti kaum tani, pengrajin tradisional, dan kaum pengusaha kecil-kecilan prakapitalis. Golongan ini dibedakan dari golongan tidak produktif yang hidup dari mengambil hasil jerih payah atau kerja orang lain seperti para tuan tanah, kaum rohaniwan, bangsawan, pencuri, dan tentara.

Kembali ke soal proletarisasi, golongan kaum tani penggarap dan pengrajin dari formasi sosial prakapitalis harus dipisahkan dari

sarana produksi dan sarana hidupnya. Sarana produksi dipisahkan dari produsen langsungnya dengan dipaksakannya pranata hak milik pribadi absolut modern atas tanah. Mereka yang terputus ikatannya dengan sarana produksi mau tidak-mau harus menjual tenaga kerjanya kepada mereka yang memiliki sarana produksi. Ketika keadaan ini meluas secara massal, barulah perekonomian kapitalis mungkin untuk muncul dan berkembang. Itulah arti pernyataan antropolog Eric Wolf bahwa "kapitalisme menjadi kapitalisme haruslah kapitalisme-dalam-produksi" (Wolf, 1990: 79). Kapitalisme baru benar-benar bisa disebut kapitalisme apabila jantung hidupnya, yaitu rasionalisasi perolehan laba berkelanjutan melalui eksploitasi tenaga kerja, memasuki ranah produksi masyarakat. Dalam arti ini kapitalisme bukanlah suatu corak komersial, tetapi corak produksi. Di dalamnya orang-orang dipilah-pilah berdasarkan hubungannya dengan akses dan kepemilikan sarana produksi.

Komodifikasi Tanah dan Tenaga Kerja

Pemisahan produsen langsung dari sarana produksinya tentu bukan dalam arti penciptaan jarak spasial, tetapi jarak antropologis. Ada batas-batas atau sekat kepranataan, yaitu hak milik pribadi absolut atas sarana produksi. Golongan sosial tanpa sarana produksi harus melewati pintu-pintu kepranataan seperti sewa atau kerja-upahan untuk bisa mendapatkan manfaat atas sarana produksinya.

Mulai akhir abad ke-16, di Eropa bagian barat, terutama Inggris, seiring dengan runtuhnya perekonomian feodal dan berkembangnya industri di wilayah perkotaan, berlangsung proses pemisahan produsen langsung dari sarana produksinya di wilayah pedesaan. Meski terjadi berangsur-angsur, tetapi peristiwanya begitu brutal. Kaum tani diusir dari dan tidak lagi bisa memanfaatkan lahan garapan. Di banyak penjuru pedesaan Inggris, lahan-lahan garapan feodal, termasuk di dalamnya lahan-lahan bersama yang disebut *commons*, dipagari, dikapling-kapling, dan disahkan menjadi milik pribadi golongan elite. Perampasan-perampasan ini didukung perundang-undangan yang dibuat wakil-wakil golongan elite di parlemen. Dengan dukungan legal, golongan elite bisa mengelola lahan-lahan rampasan itu secara kapitalistik. Entah dengan mengelola usaha pertanian yang memproduksi barang komoditi yang diperlukan industri, atau menyewakannya kepada pebisnis perkotaan yang sedang terbentuk dan sedang giat-giatnya mengembangkan peternakan domba untuk produksi wol. Memang saat itu hingga menjelang akhir abad ke-18, banyak kaum borjuis Inggris sedang berlomba-lomba memperluas cakupan operasi produksi usahanya demi ekspor komoditi terpenting Inggris di awal kapitalisme itu ke pasar dunia. Bagaimanapun juga, terbentuknya koloni-koloni di seberang lautan menciptakan pasar baru bagi barang-barang industri Inggris.

Petani-petani feodal yang sebelumnya tinggal dan hidup dari lahan-lahan garapan harus memilih

hengkang atau dituduh pembangkang hukum. Sebagai pembangkang mereka bisa diajukan ke muka pengadilan karena dianggap melanggar hukum sah dan norma suci hak kepemilikan pribadi model borjuasi yang saat itu sedang disahkan menjadi model universal melalui kolonisasi. Seperti diamati sejawaran Michel Foucault, mulai sejak abad ke-17 “kepemilikan menjadi kepemilikan absolut: semua ‘hak’ yang ditoleransi, yang telah diperoleh atau dipelihara kaum tani selama ini...sekarang ditolak” (Foucault, 1978: 85). Tidak ada lagi pintu untuk kepemilikan berdasarkan kerja. Orang bisa memiliki lahan tanpa menggarapnya. Orang bisa memiliki hasil dari lahan dengan mengambil hasil kerja orang lain. Semua jenis lahan yang secara hukum tertulis menjadi milik seseorang, meskipun bukan berasal dari upayanya menggarap, tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh mereka yang bisa menggarapnya.

Proses pengkaplingan lahan dengan model kepemilikan absolut khas borjuasi beserta pengusiran kaum tani penggarap darinya ini di dalam sejarah Inggris kemudian dikenal sebagai *Enclosure*. Proyek-proyek *enclosure*, entah itu di kampung halamannya kapitalisme Eropa Barat saat itu, maupun hingga sekarang di negeri-negeri pinggiran kapitalis seperti Indonesia, dalam pandangan antropolog ekonomi Karl Polanyi “layak disebut sebuah revolusi kaum kaya melawan kaum miskin” (Polanyi, 2001: 37). Mengapa demikian?

Proses pengkaplingan secara dialektis berkelindan dengan penciptaan pranata-pranata sosial yang cocok dengan model kepemilikan

pribadi kapitalis. Pranata pertama ialah kerja-upahan dan pasar tenaga kerja. Di dalam kerja-upahan seseorang bekerja kepada pihak lain dengan upah berupa sejumlah tertentu uang yang harganya ditentukan permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja.

Bersama-sama dengan munculnya hubungan kerja-upahan, pranata-pranata lain juga berkembang. Dua di antaranya yang terpenting ialah pasar tanah dan pasar uang. Kedua-dua pranata ini merupakan penyokong keberlanjutan pranata kepemilikan pribadi model borjuis yang memungkinkan akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Tanah dijadikan barang dagangan. Begitu pula dengan uang. Harga keduanya ditentukan pasar.

Pasar adalah pranata yang menata jejaring sosial pertukaran dengan berbasiskan penawaran dan permintaan. Simpul penghubung satu-satunya dalam berhubungan di dalam pasar adalah uang. Siapa saja yang memiliki sejumlah tertentu uang bisa secara efektif mendapatkan barang atau jasa apapun yang dikehendaki seharga nilai uang yang dimilikinya. Meski kapitalisme tidak bisa ditandai hanya oleh keberadaan pasar, pasar merupakan pranata pokok karena menjadi satu-satunya pranata pertukaran yang sah di bawah kapitalisme.

Dalam pandangan antropolog Karl Polanyi, kemunculan pasar yang dianggap menata dirinya sendiri hanya melalui permintaan dan penawaran sebagai satu-satunya patokan, merupakan suatu keganjilan historis. Di dalam pasar kapitalis, semua hasil produksi ada

hanya untuk dijual, dan semua pendapatan hanya ada untuk membeli. Harga semua hal yang ditawarkan dan diminta ditentukan sepenuhnya oleh seberapa besar penawaran dan permintaan yang muncul di pasar. Inilah hukum dasar pasar swatata (*self-regulated market*).

Di bawah kapitalisme, pasar bukan hanya pranata pertukaran. Tidak seperti pasar-pasar pra-kapitalis, pasar model kapitalis beserta hukumnya ini menjadi pranata komodifikasi dan akumulasi. Segala hal yang bisa menghasilkan keuntungan bagi golongan pemilik sarana produksi akan diperlakukan sebagai komoditi. Seperti wabah, logika pasar kapitalis merambah ke segala hal, termasuk ke sesuatu yang secara empiris bukanlah komoditi. Pada mulanya mereka hanya mengkomodifikasi tenaga kerja, tanah, dan uang. Kemudian mereka mengkomodifikasi segala hal, termasuk sekarang ini organ tubuh, rasa aman, kebahagiaan, dan lambang keagamaan.

Di bawah pasar kapitalis harga tenaga kerja, tanah, dan uang diperlakukan sama dengan komoditi. Muncul nama khusus untuk harga ketiganya, yaitu upah, sewa, dan bunga. Antropolog ekonomi Karl Polanyi (2001: 73-4) melihat gejala ini sebagai suatu keganjilan historis, karena, betapa tidak, menurutnya, "tenaga kerja hanyalah nama lain dari kegiatan manusia yang mengada seiring dengan kehidupan mereka sendiri dan karenanya direproduksi bukan untuk dijual" (Polanyi, 2001: 75), tetapi pasar tenaga kerja telah menjadikan "kehidupan itu sendiri"

tak lebih dari sekadar sarana perolehan laba para pemodal. Tidak sama dengan komoditi, tenaga kerja ada di dalam diri manusia. Tenaga kerja bukan sesuatu yang ada di luar kehidupan. Tidak bisa ia dipisahkan dari kehidupan, lalu disimpan atau dikerahkan untuk dijual layaknya mengerahkan gelondongan kayu jati dari hutan (Polanyi 2001: 75-6).

Begitu pula yang terjadi dengan tanah. Tanah tiada lain adalah alam yang tidak diproduksi manusia. Di bawah kapitalisme, tanah menjadi faktor produksi penting. Di atas bidang tanahlah kegiatan produksi dilakukan. Karena kedudukan vitalnya inilah harga tanah tercipta dan dengan itu pula pasarnya. Dalam pandangan antropolog Frederic Pryor, secara praktis, muncul dan merebaknya pasar tanah menyediakan saluran yang memudahkan kapitalis menginvestasi uangnya ke dalam produksi. Dalam kerangka kepemilikan pribadi absolut-formal model borjuis, tanah milik bisa digadaikan, disewakan, dan digunakan sebagai jaminan kredit ke bank komersial untuk membiayai kegiatan industrial (Pryor, 2005: 140). Penciptaan pasar tanah merupakan prasyarat penting muncul dan berkembangnya kapitalisme industrial; bentuk sejati kapitalisme.

Dalam pandangan Polanyi, pelekatan sifat komoditi kepada tenaga kerja dan tanah yang disertai oleh munculnya pasar atas keduanya tiada lain hanyalah khayalan belaka. Tetapi khayalan ini merupakan sesuatu yang diperlukan untuk mendukung tegaknya perekonomian kapitalis yang rakus komodifikasi.

Seiring dengan penghancuran formasi sosial nonkapitalis dan pemisahan golongan produsen langsung dari tanah garapan dan sarana produksi, di bawah asuhan pasar kapitalis inilah masyarakat terpilah menjadi dua lapisan sosial, yaitu mereka yang memiliki sarana produksi serta uang, dan mereka yang tidak memiliki atau terbatas akses terhadapnya. Golongan pertama disebut Marx sebagai *kapitalis* karena mereka menguasai dan hidup dari sekadar memiliki kapital (sarana produksi dan uang), sedangkan yang kedua disebut *proletariat* karena tidak menguasai apapun selain kemampuannya bekerja. Sumber utama pendapatan kapitalis ialah laba, bunga atau riba, dan sewa dari jerih payah mereka memiliki kapital, sedangkan sumber pendapatan utama proletar ialah upah dari menjual tenaga kerja mereka kepada orang lain.

Penciptaan Proletariat

Di dalam sejarahnya, pemisahan sarana produksi dari produsen langsungnya sama sekali tidak mirip dengan melepas burung merpati dari kandang. Ia lebih mirip dengan melepaskan ikatan kerbau gila raksasa di tengah pasar yang ramai. Proses pemisahan membuat luka, cucuran darah, dan membawa kematian ke dalam hidup para korbannya dalam arti harafiah disertai “penghancuran paripurna terhadap tatanan sosial tradisional” (Polanyi, 2001: 81). Pemisahan petani dari lahan garapan dilakukan dengan pengusiran, perampasan, dan perampokan yang disahkan peraturan resmi. Selama puluhan tahun proses ini menggusur ratusan ribu orang dari pedesaan. Dari sana

mereka berduyun-duyun memasuki gerbang dunia industri sebagai buruh upah di pabrik-pabrik kapitalis yang mulai bertumbuh di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19.

Di Inggris, kampung halaman Revolusi Industri, pengkaplingan dan penggusuran kaum tani berlangsung secara cepat dan paripurna pada abad ke-19. Masa ini disebut juga masa proletarisasi massal. Seperti halnya berbagai pranata sosial dalam masyarakat kapitalis, penciptaan kerja-upahan dan proletariatnya selalu didukung perundangan-undang sehingga sah menurut nalar politik borjuasi. Di Inggris ada *Bill of Inclosure of Commons*. Dengan bekal peraturan ini golongan borjuasi dan kaum elite berjuang mengkaplingi lahan-lahan pertanian di seluruh penjuru Inggris. Dengan begitu mereka bisa menegakkan pilar-pilar tatanan kapitalis secara sah dan meyakinkan. Tentang ini, Marx berkomentar: “*Bill of Inclosure of Commons*, kata lainnya ialah dekrit yang dengan dekrit itu para penguasa-lahan menganugrahi diri sendiri lahan-lahan penduduk menjadi milik pribadi, [atau] dekrit penggusuran penduduk” (Marx, 1990: 885).

Selain itu ada pula *Bill of Reform* yang terbit pada 1832 dan *Poor Law Amendment* yang terbit 1834. Setelah mengesahkan perampasan dan perampokan lahan dari para penggarapnya secara sah, dua undang-undang tersebut membantu memberangus semua wujud terakhir paternalisme feodal dan melepaskan kaum miskin di segenap penjuru Inggris dari ikatannya tradisional, termasuk dari perlindungan jaminan sosial (Polanyi, 2001: 84).

Kedua kebijaksanaan tersebut merupakan kunci paripurnanya penciptaan pasar tenaga kerja. Mengapa? Pertama-tama karena setelah terusir dari lahan-lahan garapan, mereka tidak bisa lagi menghasilkan sarana hidup sendiri. Apa jadinya apabila kaum tani tak lagi bisa bercocok tanam? Tentu saja mereka tidak akan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kedua, karena setelah tidak bisa lagi menghasilkan pemenuh kebutuhan hidupnya sendiri mereka juga tidak bisa mendapat bantuan dari berbagai bentuk bantuan dan jaminan hidup tradisional. Lalu apa jadinya apabila orang-orang tanpa sarana dan jaminan hidup berbondong-bondong mengalir ke perkotaan untuk mencari makan sementara pabrik-pabrik modern baru saja memulai peran sejarahnya? Sesuai hukum penawaran dan permintaan, jawaban rasional pertanyaan ini ialah buruh boleh diupah serendah mungkin. Itulah yang memang terjadi. Tidak sedikit, termasuk pekerja kanak-kanak, yang diupah beberapa butir kentang atau beberapa potong roti saja sehari. Jumlah yang hanya bisa untuk menjawab panggilan lapar yang kemarin. Itulah sebabnya muncul paradoks abad ke-19: terjadi peningkatan luar biasa dalam produksi barang (Inggris waktu itu pengeksport terbesar hampir semua komoditi penting dunia: batubara, besi cetakan, wol, dan garmen) dan timbunan kemakmuran yang dinikmati golongan elite. Sementara itu, banyak kasus kemiskinan brutal, kelaparan, cacat kecelakaan kerja, dan mati muda di kalangan kelas pekerja (Polanyi, 2001: 84-5). Bagaimana tidak, Poor Law Amendment 1834, pada satu sisi membolehkan pemilik pabrik atau

pertambangan mengerahkan pekerja-pekerja kanak-kanak dan perempuan sebanyak yang dibutuhkan, dan pada sisi lain membebaskan mereka dari kewajiban memperbaiki kondisi pabrik, tambang, beserta permukiman pekerja mereka. Semua buruh bekerja 14 hingga 16 jam sehari. Bagi pekerja kanak-kanak, waktu kerja yang panjang dan kondisi tempat kerja yang brutal seringkali berujung pada kelelahan yang amat sangat sehingga mereka tanpa sengaja tertidur ketika memasuki jam-jam kerja akhir yang menyebabkan mereka mengalami kecelakaan kerja (Stern, 1963: 88-89).

Tidak hanya di tempat kerja, brutalnya keadaan kaum pekerja Inggris juga tergambar dari kondisi tempat tinggal mereka. Di dalam bukunya *The Condition of Working Class in England*, Frederick Engels mencatat laporan tentang kehidupan di tempat tinggal kaum pekerja Inggris pada 1844: "Meskipun tampilan luar tempat ini sudah mengerikan, namun saya betul-betul tidak siap saksikan kekumuhan dan kepiluan yang ditemukan di dalamnya. Di beberapa kamar tidur yang kami kunjungi malam hari, kami temukan semua orang tumpah ruah saling dempet di lantai. Ada sekitar 15 sampai 20 orang laki-laki dan perempuan menggerombol bersama, sebagian terbalut pakaian, sebagian lagi tidak. Jarang dijumpai perabot rumah di sana, dan satu-satunya yang membikin lubang ini tampak seperti tempat tinggal adalah api menyala di perapian. Pencurian dan pelacuran merupakan sumber pendapatan pokok orang-orang ini" (Engels, 1958: 46).

Pembaca yang pernah menonton film atau membaca novel *Oliver Twist* karya Charles Dicken tentu mudah membayangkan kembali yang tergambar dari laporan pandangan mata yang dikutip Engels. Karena kemiskinan dan pengangguran dikriminalisasi, maka kaum pekerja harus bersedia bekerja dengan upah betapapun rendahnya dan dengan kondisi hidup betapapun brutalnya di bedeng-bedeng kumuh sekitaran pabrik.

Proletarisasi di Pinggiran: Jawa

Di Jawa, praktik *enclosure* dan penciptaan proletariat sebetulnya sudah dimulai sejak Tanam Paksa 1830-1870 yang diterapkan dengan sungguh-sungguh “untuk mengeksploitasi jajahan secara “rasional” dan tanpa perasaan” (Levang, 2003: 9). Sejak 1830, Jawa dikelola sebagai wilayah perluasan produksi gula dan tanaman ekspor. Secara resmi golongan elite pedesaan Jawa yang menguasai tanah-tanah garapan diwajibkan menanam seperlima lahan garapannya dengan tebu sebagai ganti pajak tanah. Dalam prakteknya luasan itu bisa setengah atau lebih dari luas lahan garapan. Selain itu, mereka juga wajib mengerahkan sejumlah tertentu pekerja sebagai buruh upahan bagi perkebunan. Di bawah eksploitasi Sistem Tanam Paksa, desa-desa Jawa tidak hanya menjadi penyedia lahan perkebunan yang kebutuhannya meningkat seiring dengan akumulasi kapital, tetapi juga sumber “cadangan tenaga kerja untuk operasi gula” (Wolf, 1990: 334) yang melimpah murah.

Perluasan perkebunan sepanjang Tanam Paksa, terutama yang dikelola langsung sektor swasta, terus berlangsung dengan dukungan undang-undang persewaan yang diterbitkan masing-masing pada 1839 dan 1857. Perundang-undangan tersebut turut memperkenalkan untuk pertama kalinya pranata-pranata kapitalis seperti sewa tanah, upah, dan *panjer* ke dalam kehidupan ekonomi petani Jawa (Suhartono, 1995: 68).

Meski proletarisasi tenaga kerja dan komodifikasi lahan sudah mulai muncul sejak Tanam Paksa, tetapi penegasannya sendiri baru terjadi setelah golongan borjuasi liberal di negeri Belanda menguasai *Staaten General* (parlemen) pada 1870. Pada tahun itu parlemen menerbitkan Undang-undang Pertanahan (*Agrarische Wet*) untuk negeri jajahan. Rumusannya didasarkan kepada gagasan-gagasan kelas borjuasi Eropa tentang kepemilikan pribadi.

Agrarische Wet berfungsi seperti Bill of Inclosure of Commons di Inggris, yakni sebagai pendukung legal komodifikasi tanah dan tenaga kerja. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah kolonial menerbitkan sertifikat-sertifikat hak milik untuk lahan-lahan garapan penduduk. Tanah-tanah yang tidak digarap secara langsung, termasuk tanah adat yang tidak bisa dibuktikan secara tertulis kepemilikannya, terutama tanah-tanah dari kelompok adat atau bangsawan yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, menjadi milik “negara”. Tanah-tanah yang kemudian menjadi milik penduduk bisa disewa. Begitu pula tanah yang tergolong tanah negara. Hanya jangka waktunya saja yang ber-

beda. Tanah milik penduduk bisa disewa per tahun, sedangkan tanah negara bisa disewa melalui hak guna usaha selama 75 tahun.

Peraturan-peraturan yang diturunkan dari Agrarischewet, turut membantu percepatan terlaksananya program *enclosure* di negeri jajahan. Ordonansi Pembukaan Hutan tahun 1874, misalnya, telah “membatasi otonomi desa dengan mengalihkan wewenang membuka hutan di tanah terlantar dari kepala desa ke pejabat pemerintah” (Furnivall, 2009: 193). Di bawah pengawasan ordonansi ini, penduduk tidak bisa lagi membuka lahan-lahan garapan sembarangan. Tanah-tanah “terlantar” haram digarap oleh mereka yang membutuhkannya. Peraturan ini menjadi salah satu tonggak penting penciptaan proletariat. Bagaimanapun, tanpa lahan, kaum tani tidak bisa lagi menjadi petani.

Orang-orang yang terusir dari lahan garapan jumlahnya pasti amat banyak saat itu karena “para pejabat desa memperoleh kebebasan besar dalam pembagian tanah, dapat semaunya sendiri menolak atau menyetujui permohonan dan sudah tentu dapat pula memilih sawah-sawah yang baik bagi dirinya” (Bremen, 1986: 25). Lahan-lahan terbaik sudah diambil kepala desa, keluarga, dan elite-elite di sekitar mereka. Ketimpangan penguasaan lahan warisan masa feodal sebelumnya memungkinkan penguasaan lahan dan perluasannya hanya bagi segelintir elite pribumi. Penduduk tanpa perlindungan sosiolegal yang mencakup petani miskin dan buruh tani, dapat dengan mudah diubah menjadi pekerja upahan. Sebagian dari mereka kemudian menjadi buruh

perkebunan tebu dan pabrik gula (Boomgaard, 1989: 122-4) atau keluar desa mencari penghidupan sebagai pekerja upahan di perkotaan (Ingleson, 2004: 7-8).

Penghentian pembukaan lahan garapan atas nama ‘kepentingan negara’ di tengah-tengah struktur sosial pedesaan Jawa yang timpang memungkinkan pemerintah kolonial memenuhi kebutuhan kaum kapitalis akan *koelie* berupah murah. Buruh-buruh murah bisa memasok tenaga kerja untuk perkebunan dan pertambangan di Jawa, Sumatra, dan juga untuk koloni-koloni Belanda di Srilanka, Afrika Selatan, atau Suriname (Wertheim, 1956: 81). Kaum tani tanpa tanah dari Jawa juga berguna memacu produksi beras dengan mendorong mereka mengikuti program *kolonisatie* ke Sumatra. Sementara itu, golongan penduduk yang lebih aman secara sosiolegal seperti para kepala desa (*beke*), petani pemilik tanah (*sikep*), bangsawan setempat, kaum pengusaha Tionghoa, serta seksi pribumi dari birokrasi pemerintah kolonial bisa mendapatkan banyak keuntungan dari komodifikasi tanah ini.

Dengan semangat liberal di jantungnya, Agrarische Wet membuat tanah terbuka bagi kaum pemodal mendulang laba di negeri jajahan. Bila sebelum 1870 usaha perkebunan merupakan *staatbedrijf* atau perusahaan negara, setelah 1870, usaha perkebunan menjadi usaha swasta. Didukung oleh perkembangan bank-bank komersial di Belanda sejak 1850, berbondong-bondonglah kaum kapitalis berinvestasi dalam pembangunan rel dan jalur kereta api, pertambangan, perbankan, dan perkebunan (Kartodirdjo, 1999: 19).

Kapitalis-kapitalis yang ber-modal besar bisa menyewa 'tanah negara' dalam jangka waktu 75 tahun dengan mendatangkan buruh-buruh dari sekitar dan tempat lain. Kapitalis yang kekurangan modal bisa dengan mudah membuka perusahaan saham gabungan. Ijin pendirian perusahaan itu sendiri bisa digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari bank-bank komersial Eropa. Dana pinjaman ini yang kemudian digunakan untuk menyewa tanah-tanah di negeri jajahan (Geertz, 1983: 88). Artinya, hampir hanya dengan modal dengkul saja kaum kapitalis bisa menghisap kekayaan tanah dan tenaga kerja negeri jajahan. Bukan kebetulan apabila sejak 1850 sampai 1870 terjadi perkembangan luar biasa dalam industri perbankan Belanda. Perkembangan ini menunjukkan telah terjadi "konsentrasi dan sentralisasi modal" di sana (Kartodirdjo, 1999: 19) hasil perkembangan industri di negeri induk yang membutuhkan ladang-ladang investasi baru.

Dalam kaitannya dengan perluasan hubungan persewaan berskala besar, kajian sejarah sosialnya Jan Breman di Keresidenan Cirebon sampai pada kesimpulan bahwa: "praktek sewa-menyewa di atas kontrak ini yang hakikatnya merupakan jasa perikatan perseorangan ialah praktek pengubahan tenaga kerja menjadi komoditi dan penjualan tenaga kerja dengan persyaratan ketat di dalam pasar yang teratur mengingatkan kepada armada tenaga kerja yang dikirim dari Cirebon untuk bekerja di Jawa Barat jauh di dalam abad ke-18 yang telah silam" (Breman, 1986: 30).

Sistem penyewaan tanah yang didukung Agrarische Wet 1870 memang merupakan kekuatan kapitalis dalam menghancurkan corak organisasi kerja feodal. Tetapi, seperti ditegaskan oleh Marx "kekuatan produksi dan hubungan produksi baru tidaklah berkembang dari ketiadaan, tidak pula jatuh begitu saja dari langit, tidak pula dari rahim Idea yang ada dengan sendirinya; tetapi dari dalam dan sebagai antitesis terhadap perkembangan produksi dan diwariskan dari hubungan kepemilikan tradisional [sebelumnya]" (Marx, 1973: 278).

Berdasarkan aturan Agrarische Wet, misalnya, kaum kapitalis memang dilarang mengambil alih lahan-lahan penduduk. Mereka hanya bisa menyewanya. Aturan ini tampak begitu mulia dan akan menghindarkan penduduk pribumi dari pengambilalihan tanah secara sewenang-wenang. Tetapi, karena kapitalis diperbolehkan menyewa lahan penduduk di tengah-tengah struktur penguasaan tanah pedesaan yang feodalistik, maka kaum kapitalis bisa mendapatkan dua sumberdaya penting, tanah dan tenaga kerja sekaligus, dengan murah karena, seperti ditegaskan sejarawan Sartono Kartodirdjo, "tanah dan tenaga kerja merupakan satu kesatuan, kedua-duanya terjalin pada organisasi politik penduduk pribumi, sehingga mereka yang menguasai tanah itu dapat menggunakan tenaga penduduk secara sewenang-wenang sebanyak yang dikehendakinya" (Kartodirdjo, 1999: 25).

Eksplotasi kapitalis dengan pranata-pranata barunya itu berdiri di atas pranata-pranata penindasan feodal yang diberi nyawa baru.

Kelas-kelas sosial pedesaan Jawa dan hubungan hirarkis di antara mereka dimanfaatkan untuk mempermudah ongkos investasi kapital. Misalnya, kerja sama kapitalis dengan para elite setempat, terutama lapisan bangsawan lokal dan kepala desanya, membangkitkan kembali pranata kerja rodi untuk membangun jalan-jalan, saluran irigasi, jembatan, dan infrastruktur produksi. Proyek pengerahan tenaga kerja paksa yang diwarisi kapitalis modern dari jaman feodal dan Tanam Paksa 1830, ternyata tidak dihapuskan meski kaum liberal di parlemen mengklaim bahwa mereka hendak menghapuskan praktik-praktik feodal dalam pembangunan perekonomian kapitalis yang liberal. Mengapa demikian? Karena “kerja rodi demikian diperlukan baik untuk memperbesar surplus dengan perluasan infrastruktur—pemukiman dan pengolahan tanah serta pembangunan jaringan lalu-lintas dan irigasi—dan untuk membiayai anggaran aparatur pemerintah yang diperlukan untuk meneruskan dan menggalakkan eksploitasi kolonial” (Bremen, 1986: 7).

Di bawah sistem eksploitasi kapitalis pasca-Agrarische Wet 1870, bangsawan setempat beserta barisan kepala desanya menjadi penanggung jawab pasokan tenaga kerja dalam jumlah banyak dengan upah rendah. Mereka menjadi ujung tombak eksploitasi kolonial. Dengan pengaruh mereka juga, harga sewa tanah yang semula ditentukan oleh pemerintah berangsur-angsur ditentukan oleh pengusaha perkebunan dengan harga, tentu saja, yang lebih rendah (Suhartono, 1991: 52-61). Sosiolog dan sejarawan Jan Bremen, misalnya, menemukan bahwa di Keresidenan

Cirebon (meliputi Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu sekarang), kepala desa setiap tahunnya menyisihkan sewilayah lahan sawah terbaik terlebih dahulu untuk perkebunan tebu sebelum membagi dan menyerahkan kembali tanah yang disewa perkebunan ke penduduk desa (Bremen, 1986: 80). Mereka adalah pengabdian setia para ‘penghisap asing’. Perannya tidak banyak berbeda dengan pemerintahan negara-negara Dunia Ketiga saat ini terhadap kekuatan kapitalis internasional.

Untuk menghindari perpindahan pekerja dari wilayah-wilayah yang pasokan tenaga kerjanya pas-pasan, pemerintah mengeluarkan aturan yang mempersulit perpindahan. Salah satu aturan itu ialah mereka yang hendak pindah harus punya saudara dengan penduduk di desa yang dituju. Tujuan aturan ini jelas. Selain untuk menyedikitkan kemungkinan perpindahan, dengan mengikat mereka kepada penduduk desa yang dituju, mereka tidak bisa lepas dari jerat kerja paksa dan kerja upahan bagi kejayaan kaum kapitalis perkebunan.

Mereka yang berhasil terlepas dari eksploitasi melalui kekuasaan kepala desa tetap tidak bisa lenggang begitu saja hidupnya. Dengan bekal Staatsblad 1838 No. 45, pemerintah kolonial bisa menangkapi orang-orang tanpa lahan yang tidak memenuhi wajib kerja serta kaum gelandangan yang terusir dari pedesaan. Mereka dikriminalisasi secara legal dan apabila tertangkap boleh dieksploitasi tanpa bayaran. Mereka dimasukkan ke dalam barak-barak kerja paksa yang diabdikan kerjanya kepada pemerintah

kolonial dan kaum kapitalis (Bremen, 1986: 32). Seperti halnya Poor Law Amendment di awal industrialisasi Inggris, Staatsblad 1838 No. 45 menjadi semacam mesin legal di “babak awal bagi timbulnya pasar tenaga kerja yang lebih luwes dan merdeka” (Bremen, 1986: 33). Aturan ini memaksa orang-orang tanpa lahan memilih menjadi buruh upahan dengan upah murah atau menjadi budak.

Apabila pasokan tenaga kerja tetap kurang, para pedagang budak sudah siap sedia dengan rombongan budak atau buruh-buruh setengah-budak yang dipasok dari daerah pedalaman Nusantara. Marx menggambarkan: “Tidak ada yang lebih jelas daripada sistem penculikan orang di Celebes dalam rangka mendapatkan budak-budak untuk Jawa. Penculik dilatih untuk tujuan ini. Penculik, juru bahasa dan penjual adalah agen-agen utama bisnis ini, para pangeran pribumi merupakan pedagang utamanya. Orang-orang muda yang berhasil diculik disembunyikan di penjara-penjara bawah tanah rahasia di Celebes sampai mereka siap diangkut kapal-kapal budak. Sebuah laporan resmi mengatakan: ‘Ini satu kota Macassar, misalnya, penuh dengan penjara-penjara rahasia, satu lebih mengerikan dari yang lainnya, penuh-padat dengan kesialan, korban-korban keserakahan dan kekejaman terikat belenggu, direnggut paksa dari keluarga-keluarga mereka’ ” (Marx, 1990: 916).

Bedol desa atau penangkapan orang-orang, lalu memindahkan mereka ke perkebunan atau pertambangan-pertambangan yang memerlukan pasokan tenaga kerja bisa juga terjadi apabila para

bangsawan setempat memilih untuk tidak turut serta dalam permainan, melakukan perlawanan, lalu kalah. Tenaga kerja buruh-buruh setengah budak ini menjadi semacam pampasan perang yang bisa dijual kepada siapapun kapitalis yang memerlukan pasokan buruh murah. Tentang salah satu wilayah yang kaum bangsawannya dikenal pembangkang, Marx menulis: “Banjuwangi, sebuah propinsi Jawa, terhitung berpenduduk 80.000 jiwa pada 1750 dan hanya 18.000 pada 1811. Itulah [hasil] usaha yang penuh damai” (Marx, 1990: 916).

Penerbitan Agrarische Wet 1870, selain penting untuk membatasi akses kaum tani atas lahan-lahan yang belum digarap, juga vital untuk mendapatkan pendapatan tahunan dari pajak. Tidak seperti kebijakan semasa Tanam Paksa yang kolot, kaum borjuis liberal di parlemen Belanda paham betul bahwa eksploitasi modern harus menyertakan juga perpajakan modern. Tanah-tanah dipajaki. Mereka yang tercatat sebagai pemilik lahan diwajibkan membayar sejumlah tertentu uang kepada pemerintah. Pemerintah kolonial dan raja-raja lokal bawahan mereka menggunakan dana pajak untuk membiayai birokrasi dan, terutama, untuk membayar hutang mereka kepada kaum kapitalis keuangan. Di dalam skema perpajakan modern, mengalirlah uang dari kapitalis ke pemerintah kolonial dalam rupa hutang publik dan penyewaan tanah negara, lalu ke rakyat pekerja lewat sewa tanah dan upah. Dari sana uang itu kembali ke kapitalis dalam bentuk pengembalian pinjaman bunga dan laba.

Dalam pandangan Marx, sistem perpajakan modern merupakan satu dari segi empat eksploitasi kapitalis di wilayah koloni selain lahan koloni, hutang nasional dan sistem proteksi. Sistem perpajakan modern “memanfaatkan kekuasaan negara, kekuatan masyarakat yang terpusat dan terorganisasi, untuk mempercepat, seperti halnya di dalam kandang eraman, proses peralihan corak produksi feodal menjadi corak kapitalis, dan memendekkan peralihannya. Pemaksaan adalah istri setiap masyarakat tua yang sedang mengandung yang baru. Ia sendiri sebuah kekuatan ekonomi”, simpul Marx (1990: 915-916).

Di tingkat kehidupan sehari-hari, perpajakan modern membawa kehidupan penduduk Jawa ke dalam ekonomi uang. Sementara itu, dalam kesimpulan Jan Breman, “ekonomi uang yang sedang bertumbuh... membantu pemerintah kolonial dalam merapatkan genggamannya pada golongan tani tak bertanah dan untuk memaksanya agar menyerah kepada kebutuhan ekonomi pasar” (Breman, 1986: 40).

Dalam konteks perluasan pasar untuk barang-barang industri Eropa, pemaksaan perekonomian uang modern lewat sistem upah, sewa, dan sistem pajak modern seiring dengan penghancuran corak produksi rumahtangga tradisional merupakan jalan pembukaan pasar-pasar baru. Bagaimanapun juga realisasi nilai-lebih dari produk-produk industri yang dihasilkan pabrik-pabrik kapitalis seperti tekstil dan pakaian hanya dimungkinkan oleh perluasan ketergantungan penduduk suatu wilayah kepada pasar kapitalis. Barang-barang industri tekstil Belanda dari Twente,

misalnya, “menggantikan industri tenun rumahan pribumi dan mendesak kaum tani Jawa lebih jauh menuju perekonomian uang” (Wertheim, 1956: 80).

Akumulasi Primitif dan Perkembangan Kapital

Tiga proses seiringan, yaitu penghakmilikan tanah menurut konsepsi kepemilikan pribadi borjuasi Eropa, penciptaan golongan sosial baru para pekerja-upahan, dan akumulasi kekayaan ke tangan segelintir elite lewat gerakan *enclosure* ditambah dengan pengaturan upah pekerja murah di sektor-sektor penopang kapitalisasi yang dilindungi peraturan-peraturan resmi pemerintah pada masa awal kapitalisme modern ini, disebut Karl Marx sebagai “*ursprüngliche akkumulation*” atau akumulasi primitif (Marx, 1990: 873).

Sepanjang bagian kedelapan Das Kapital jilid pertama Marx mengajukan teori akumulasi primitif. Teori akumulasi primitifnya Marx merupakan tanggapan terhadap teori akumulasi primitifnya Sir Adam Smith dan ekonom borjuis. Di dalam teorinya Adam Smith dinyatakan bahwa berlangsungnya produksi kekayaan modern secara logis haruslah didahului oleh adanya timbunan kekayaan sebelumnya. Produksi kemakmuran modern yang ditopang pembagian kerja sosial antara pemilik tanah, pekerja, dan kapitalis, mestilah diawali suatu keadaan tertentu di masa lalu yang di dalamnya telah terjadi pengumpulan kekayaan secara tidak merata di antara anggota masyarakat. Kekayaan terkumpul ini yang kemudian memunculkan pembagian kerja sosial dan,

akhirnya, produksi kemakmuran modern (Smith, 1976: 277-8). Sir Smith menyebutnya pengumpulan kekayaan ini sebagai "*previous accumulation*". Jadi, dalam teorinya Sir Smith, pembagian kerja sosial atau dalam peristilahan Marxis keterpilahan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, ada setelah munculnya timbunan kekayaan di tangan segolongan orang.

Pertanyaannya, dari mana timbunan kekayaan ini berasal? Tidak seperti teolog yang merujuk kepada Tuhan sebagai asal usul, Sir Smith, layaknya kaum borjuis terdidik, mencari akarnya di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi mirip dengan teolog Abad Pertengahan, Sir Smith percaya bahwa pada dasarnya ada dua jenis manusia dengan kodrat alamiah yang berbeda. Perbedaan kodrat inilah yang menjadi dasar munculnya perbedaan di antara mereka sekarang dalam kekayaan yang berhasil dikumpulkan. Dengan teori ini Adam Smith seolah-olah hendak meyakinkan kaumnya bahwa mereka tidak perlu merasa bersalah dengan adanya ketimpangan sosial. Kelas-kelas sosial tercipta dari suatu proses alami yang tidak bisa ditembus campur tangan manusia perorangan.

Setiap masyarakat di delapan penjuru mata angin selalu punya cerita, entah dalam bentuk mitos ataupun legenda, yang memberi penjelasan tentang keterpilahan masyarakat ke dalam golongan-golongan yang berbeda peringkat sosialnya. Di dalam masyarakat prakapitalis selalu ada mitos atau legenda yang menyebutkan bahwa para pemimpin di antara mereka merupakan keturunan dewata. Mereka ada orang-orang terpilih

yang menjadi perantara kerja Dewa di bumi. Dengan mandat dewata golongan elite masyarakat berhak mengatur banyak hal dari kehidupan rakyatnya; berhak mendapatkan penghormatan, berhak mendapat sebagian hasil kerja rakyat, berhak mengerahkan tenaga kerja rakyat. Nah, di dalam masyarakat kapitalis, mitos dan legenda kuno ini digantikan oleh berbagai teori sosial yang menyokong kedudukan golongan elite dalam status quo. Di dalam sistem mitologi borjuis, misalnya, asal-usul pembagian kerja di dalam masyarakat diyakini bermula dari dalam masa lalu yang di dalamnya ada sekelompok orang 'yang rajin, hemat, dan gemar menabung' dan sekelompok orang 'yang malas, boros, suka hambur-hambur'. Golongan yang sekarang menjadi elite ekonomi merupakan keturunan individu-individu rajin, hemat, dan gemar menabung kekayaannya. Di pihak lain mereka yang sekarang harus menjual tenaga kerjanya kepada golongan elite adalah keturunan dari individu-individu yang malas, boros, dan menghambur-hambur kekayaan. Hingga sekarang, gagasan borjuis tentang terciptanya kelas-kelas di dalam masyarakat kapitalis masih menjadi dasar argumen pendukung kapitalisme. Inilah gagasan yang ditantang Marx melalui teori akumulasi primitifnya.

Marx memulai kritiknya terhadap teori akumulasi primitifnya Smith dengan memberi judul dari bagian delapan jilid pertama *Das Kapitalnya* dengan "*so-called primitive accumulation*". Di dalam bagian tersebut Marx bicara soal "akumulasi primitif dalam tanda kutip" seperti yang saat itu diimani oleh kaum borjuis dan parasit-

parasit intelektualnya. Lalu Marx menyindir lebih lanjut dengan pernyataan bahwa sebetulnya teori “akumulasi primitif itu memainkan peran yang sama di dalam ekonomi politik seperti halnya dosa awal dalam teologi” (Marx, 1990: 873). Perumpamaan yang dipilih Marx tepat. Baik doktrin dosa asal maupun teori akumulasi primitif dalam pandangan Smith dan ekonom borjuis sama-sama mengaburkan asal-usul ketidakberuntungan orang-orang yang menderita ke dalam kabut ahistoris di dalam masa lalu yang nun jauh di entah kapan.

Doktrin dosa asal menjelaskan bahwa penderitaan manusia sekarang ini merupakan akibat dari dosa asal yang dilakukan manusia pertama di sorga. Teori akumulasi primitifnya Smith menjelaskan bahwa adanya pembagian kerja antara mereka yang menguasai sarana produksi dan mereka yang harus menjual tenaga kerjanya kepada pemilik sarana produksi ini adalah karena di dalam masa awal ada orang-orang yang rajin, hemat, dan kreatif di satu sisi dan orang-orang malas, boros, dan bodoh di sisi lain. Kekayaan yang dimiliki golongan elite sekarang merupakan imbalan atas karma baik leluhur mereka dahulu. Begitu pula kemiskinan dan derita golongan pekerja merupakan akibat dari “dosa asal” nenek moyang mereka yang malas dan boros.

Teori akumulasi primitif Marx diawali dengan gagasan bahwa kapital dan tertimbunnya kekayaan kelas pemilik sarana produksi merupakan hasil perampasan terhadap kekayaan sosial hasil kerja golongan lain. Sementara Adam Smith dan ekonom borjuis percaya

bahwa keberadaan kelas-kelas sosial di dalam masyarakat kapitalis tercipta secara sukarela dan damai di bawah pengawasan pertukaran pasar yang adil, Marx tegas mengaitkan terbentuknya pembagian kerja dalam masyarakat kapitalis dengan akumulasi primitif yang penuh pemaksaan.

Adam Smith dan ekonom borjuis setelahnya mendasarkan teori akumulasi primitifnya dari penalaran deduktif dengan mengimani filsafatnya John Locke tentang keadaan asali manusia serta asal-usul kepemilikan sebagai premis pertama. Sementara itu, berseberangan dengan Smith, bagunan teori akumulasi primitifnya Marx didirikan di atas hasil penyelidikan historis. Sepanjang bagian delapan Das Kapital jilid pertama (Bab 26-33) Marx mengajukan bukti-bukti sejarah tentang perampasan tanah, pengkaplingan, pengusiran kaum tani, kebijakan upah murah, dan sebagainya, yang mendahului revolusi kapitalis. Di situ Marx juga menggambarkan berabad perampokan para penjajah Eropa terhadap rakyat dan kekayaan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika sebagai bagian integral dari akumulasi primitif. Semua kekejaman historis ini mendahului muncul dan berkembangnya pembagian kerja sosial antara kapitalis dan proletariat, dominannya hubungan produksi kapitalis, dan akumulasi kekayaan beserta kekuasaan politiknya di tangan segelintir elite ekonomi masyarakat.

Pada tingkatan teoritis, teori akumulasi primitif Marx bertujuan menghancurkan teori akumulasi primitifnya Sir Adam Smith yang ahistoris. Pada tingkatan etis Marx

hendak menghapuskan keimanan di kalangan borjuasi bahwa keterpilahan sosial yang timpang merupakan hasil dari proses pasar yang adil.

Di dalam teori akumulasi primitifnya, Marx juga mengarahkan telaah historisnya ke munculnya pranata pasar kapitalis untuk menolak teori pasarnya Smith. Smith berpandangan bahwa pasar merupakan mekanisme yang bekerja dengan adil karena tangan gaib pasar merupakan pemandu cerdas bagi individu-individu menuju kemakmuran niscaya yang dalam jangka panjang akan membawa ke kemakmuran bangsa. Marx menunjukkan bahwa sebagai pranata pokok masyarakat kapitalis, pasar kapitalis tidaklah muncul dan bekerja secara damai dan kesukarelaan, tetapi justru sebaliknya, penuh dengan paksaan dan penindasan.

Di dalam analisis sejarahnya Marx, munculnya pasar tanah dan tenaga kerja, misalnya, dikatakan merupakan hasil dari proses yang di dalamnya: "lahan-lahan pertanian diberikan begitu saja atau dijual dengan harga yang konyol atau dikuasai sebagai lahan pertanian swasta melalui penyerobotan langsung" (Marx, 1990: 884). Kerjasama para penguasa politik dengan elite-elite borjuis telah memungkinkan kaum elite "menganugrahi diri mereka lahan-lahan garapan penduduk menjadi milik pribadi [mereka]" yang ujung-ujungnya ialah meningkatkan "pasokan proletariat merdeka sekaligus tanpa hak yang tercerabut dari lahan-lahan mereka" (Marx, 1990: 885) sebagai sumberdaya utama yang eksploitasi di dalam pabrik-pabrik kapitalis.

Keberadaan orang-orang tanpa sarana produksi dan jaminan sarana hidup ini penting artinya dalam konsolidasi corak produksi kapitalis. Juga penting bagi langgengnya kekuasaan elite ekonomi terhadap sebagian besar penduduk di manapun kapitalisme menginjakkan kakinya. Pada tahap konsolidasi, kelimpahan tenaga kerja murah diperkuat lagi dengan dikeluarkannya berbagai kebijaksanaan yang mengatur upah yang cocok buat akumulasi kekayaan golongan elite. Penciptaan kondisi dan penerbitan undang-undang yang mengatur panjangnya waktu kerja dan rendahnya tingkat upah rata-rata yang memperkuat ketergantungan sebagian besar orang kepada sistem kerja-upahan, menurut Marx adalah salah satu "aspek mendasar dari apa yang disebut akumulasi primitif" (Marx, 1990: 900).

Akumulasi primitif adalah pendahulu historis, pengiring setia, dan salah satu batu penjurur bangunan masyarakat kapitalis. Ia harus dibedakan, mesti tidak bisa dipisahkan, dari akumulasi kapital (yang akan diulas lebih lanjut dalam Bab 4 dan 5). Yang terakhir ini muncul sebagai hasil dari eksploitasi di dalam sektor-sektor kapitalis dan tempat-tempat penciptaan nilai-lebih. Namun, akumulasi primitif tidak hanya terkait dengan masa lalu kelam kapitalis. Ia bukanlah proses yang sudah selesai, tetapi termasuk cara yang terus digunakan kapitalis modern untuk menciptakan proletariat di mana pun kapitalis ingin mengeruk laba.

Rosa Luxemburg, seorang ekonom marxis kelahiran Polandia, dalam penyelidikan teoritis terhadap

akumulasi kapital menegaskan bahwa akumulasi kapital sebagai suatu proses historis aktual secara keseluruhan memiliki dua aspek yang berhubungan erat satu sama lain. "Pertama berkenaan dengan pasar komoditi dan tempat nilai-lebih diproduksi—pabrik, tambang, lahan pertanian. Dalam aspek ini akumulasi semurni-murninya adalah proses ekonomi dengan tahap terpentingnya berupa transaksi antara kapitalis dan pekerja upahan... Aspek lain akumulasi kapital berkenaan dengan hubungan antara kapitalisme dan corak-corak produksi non-kapitalis yang mulai tampak di panggung internasional. Cara akumulasi di sini ialah dengan kebijaksanaan kolonial, suatu sistem hutang internasional—kebijaksanaan yang terkait dengan bunga—dan perang. Paksaan, penipuan, penindasan, perampasan secara terbuka ditampilkan tanpa ada upaya menutup-tutupi" (Luxemburg, 2003: 432).

Di negeri-negeri bekas jajahan dengan sumberdaya alam dan angkatan kerja melimpah, praktik akumulasi primitif berlaku seiring sejalan dengan akumulasi kapital di pusat-pusat industrinya. Tanah-tanah yang sebelumnya merupakan lahan hidup kaum tani atau suku-suku pedalaman dirampas 'secara legal' untuk dijadikan lahan perkebunan komersial, pertambangan, atau pusat-pusat industri. Terutama di Jawa, tidak sedikit lahan-lahan pertanian skala kecil yang dialihfungsikan menjadi pusat-pusat industri atau dam-dam pembangkit listrik demi pembangunan sepanjang berkuasanya Orde Baru dengan biaya murah. Mereka tinggal pindahkan penduduknya ke pulau-pulau sepi penduduk melalui program trans-

migrasi. Sekiranya penduduk menolak, tuduhan komunis sudah siap dilekatkan. Dengan cap 'komunis' di kening identitas sosial mereka, pembunuhan, pengusiran, dan perampasan tanah-tanah mereka menjadi sah di mata publik. Dari tanah-tanah yang diceraabut penguasaannya, berbondong-bondonglah kaum miskin perdesaan menuju perkotaan untuk dieksploitasi di pabrik-pabrik kapitalis modern.

Hingga sekarang, di Dunia Ketiga, seiring dengan proses ekspansi kapitalisme, petani-petani kecil, buruh-buruh tani, para pengrajin desa, atau setidaknya anak-anak mereka, generasi kedua atau ketiga dari komunitas suku-suku pedalaman yang begitu beruntung di tanah tempat hidup mereka terkandung sumberdaya alam yang penting bagi pasar kapitalis, diubah keadaan menjadi proletariat. Mereka memenuhi kelaparan kapital akan tenaga kerja upahan, komodifikasi, dan kapitalisasi semua sektor, dan proses ini belum akan berakhir Senin depan. Tersedianya pasokan proletariat, yaitu orang-orang yang bebas dari ikatan dengan tatanan tradisional, termasuk bebas dari sarana produksinya, merupakan prasyarat material "ekspansi kuantitatif kapitalisme" (Weber 2001: 25).

Proletarisasi merupakan prasyarat beroperasinya kapital. Tanpa proletariat tidak akan ada kapital, dan tanpa kapital tidak akan ada kapitalis. Proses penciptaan hubungan sosial produksi kapitalis tidak hanya akan membawa slip gaji ke dalam barisan benda kultural kelas pekerja modern, tetapi sering kali juga menorehkan luka darah pada korban-korban di sepanjang

proses penciptaannya seperti dikatakan oleh Marx secara puitis, “kapital hadir mengucur deras dari kepala hingga kaki, dari setiap lubang pori-pori, dengan darah dan kotoran” (Marx, 1990: 926).

Penutup

Dari uraian sepanjang bab ini, tepat kiranya apa yang dikatakan ekonom Michael Perelman saat menyimpulkan bahwa “akumulasi primitif memotong cara hidup tradisional ibarat gunting” (Perelman, 2000: 14). Mata gunting pertama mematikan kesanggupan

orang-orang kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan mata gunting kedua menghalangi orang-orang kebanyakan menemukan alternatif lain di luar sistem kerja upahan untuk tetap bertahan hidup. Kedua mata gunting akumulasi primitif inilah yang hingga kini memungkinkan kelas kapitalis menghisap kerja dan hasil kerja kelas proletariat. Itulah mengapa penciptaan hubungan sosial produksi kapitalis beserta akumulasi primitifnya “layak disebut sebuah revolusi kaum kaya melawan kaum miskin” (Polanyi, 2001: 37).

Daftar Pustaka

- Boomgaard, Peter. 1989. *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java 1798-1880*. Amsterdam: Free University Press.
- Breman, Jan. 1986. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- Engels, Frederick. 1958. *The Condition of Working Class in England 1844*. New York: MacMillan.
- Foucault, Michel. 1978. *Discipline and Punish: the Birth of Prison*. New York: Pantheon.
- Furnivall, J.S. 2009. *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Harris, Marvin. 1999. *Theories of Culture in Postmodern Times*. Walnut Creek, CA: Altamira Press.
- Ingleson, John. 2004. *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja, dan Perkotaan Masa Kolonial*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Levang, Patrice. 2003. *Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: KPG, IRD, Forum Jakarta-Paris.
- Luxemburg, Rosa. 2003. *The Accumulation of Capital*, London: Routledge.
- Marx, Karl. 1973. *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy*. London: Penguin Books dan New Left Review.

- Marx, Karl. 1990. *Capital: a Critique of Political Economy*, Volume 1. London: Penguin Books.
- Perelman, Michael. 2000. *The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation*. Durham dan London: Duke University Press.
- Polanyi, Karl. 2001. *The Great Transformation: the Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Pryor, Frederic L. 2005. *Economic Systems of Foraging, Agricultural, and Industrial Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stern, Walter M. 1963. *Britain Yesterday and Today: An Outline Economic History from the Middle of the Eighteenth Century*. London: Longmans.
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta. 1830-1920*. Jogjakarta: Tiara Wacana.
- Weber, Max . 2001. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Routledge.
- Wertheim, W.F. 1956. *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*, The Hague: N.V. Uitgeverij W. Van Hoeve.
- Wolf, Eric. 1990. *Europe and the People without History*, California: California University Press.